

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi Kemiskinan

Definisi mengenai kemiskinan sangat beragam mulai dari ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hingga definisi kemiskinan dengan mempertimbangkan komponen sosial dan moral. Kemiskinan dapat diartikan suatu kondisi serba kekurangan. Kemiskinan juga dapat dicirikan dengan ketidak mampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pangan, perumahan, dan pakaian, tingkat pendapatan rendah, pendidikan dan keahlian rendah, keterasingan sosial karena keterbatasan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Singkatnya, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar hidup yang rendah yaitu suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Suparlan,1984).

Sementara itu menurut Chambers dalam Chriswardani Suryawati (2005) kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1)

kemiskinan (*proper*), 2) ketidak berdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidak berdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidak berdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri

Kemiskinan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kelompok sesuai dengan pemahaman atas kondisi kemiskinan yang dihadapi (krisnamurthi, 2006), yaitu:

1. Kemiskinan absolut, kemiskinan yang terjadi bila seseorang, keluarga, atau masyarakat yang tingkat pendapatan atau pengeluarannya berada di bawah suatu batas minimal tertentu untuk dapat hidup layak sebagai manusia. Batas tersebut disebut garis kemiskinan.
2. Kemiskinan relatif, kemiskinan yang terjadi jika seseorang, sekeluarga, atau masyarakat yang tingkat pendapatannya atau pengeluarannya relatif lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan atau pengeluaran masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan Kronis (*chronic*) atau struktural, kemiskinan ini terjadi jika kondisi kemiskinan ini yang terjadi terus menerus dalam jangka waktu yang lama.

4. Kemiskinan sementara (transitory) atau accidental, kemiskinan ini terjadi akibat adanya perubahan atau „shock“ yang mengakibatkan seseorang atau sekeluarga atau masyarakat berubah dari tidak miskin menjadi miskin.
5. Kemiskinan masal, terjadi jika sebagian besar dari masyarakat mengalami kemiskinan.
6. Kemiskinan individual, yaitu kemiskinan yang terjadi jika hanya beberapa orang atau sebagian kecil masyarakat yang mengalami kemiskinan.

2.1.2 Ukuran Kemiskinan

Di Indonesia banyak definisi dan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan kemiskinan, namun secara umum tingkat kemiskinan di Indonesia diukur berdasarkan standar yang ditentukan oleh Badan Pusat Statistik. BPS mendefinisikan kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Kebutuhan dasar ini merupakan kebutuhan minimum yang harus dimiliki seseorang untuk dapat hidup dengan layak. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jika rata-rata pengeluaran per kapita suatu penduduk di bawah garis kemiskinan maka disebut penduduk miskin

Garis kemiskinan diukur dari besarnya rupiah yang dibelanjakan perkapita dalam sebulan untuk memenuhi kebutuhan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Kebutuhan minimum dan makanan menggunakan patokan 2100 kalori per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar

makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa (BPS 2018). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Rumus perhitungan untuk mendapatkan garis kemiskinan adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM}$$

Dimana:

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada tiga indikator dasar kemiskinan yang digunakan BPS, yaitu Head Count Index (HCI-P0) yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan melihat seberapa miskin orang miskin tersebut. Semakin tinggi nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara

penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskinan menunjukkan semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

2.1.3 Ciri-ciri Kemiskinan

Menurut Hartomo dan Aziz (1997) mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan memiliki beberapa ciri, yaitu:

1. Mereka umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal maupun keterampilan. Faktor produksi yang dimiliki sendiri sedikit sekali sehingga kemampuan memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.
2. Mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan maupun modal usaha, sedangkan syarat tidak terpenuhi untuk memperoleh kredit perbankan seperti adanya jaminan kredit dan lain-lain, sehingga mereka yang perlu kredit terpaksa berpaling kepada “lintah darat” yang biasanya meminta syarat yang berat dan memungut biaya yang tinggi.
3. Tingkat pendidikan mereka yang rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar. Waktu mereka habis tersisa untuk mencari nafkah sehingga tidak tersisa lagi untuk belajar. Anak-anak mereka tidak dapat menyelesaikan sekolah, karena harus membantu orang tua mencari tambahan penghasilan atau menjaga adik - adik di rumah, sehingga secara turun-temurun mereka terjatuh dalam keterbelakangan garis kemiskinan.

4. Kebanyakan mereka tinggal di perdesaan. Banyak diantara mereka tidak memiliki tanah, walaupun ada kecil sekali. Umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar di luar petani, karena pertanian bekerja dengan musiman maka kesinambungan kerja kurang terjamin. Banyak diantara mereka kemudian bekerja sebagai “pekerja bebas”, berusaha apa saja. Dalam keadaan penawaran tenaga kerja yang besar maka tingkat upah menjadi rendah sehingga mengurung mereka dibawah garis kemiskinan, di dorong dengan kesulitan hidup di desa maka banyak diantara mereka mencoba berusaha di kota.
5. Kebanyakan diantara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan, sedangkan di kota banyak negara sedang berkembang tidak siap menampung gerak urbanisasi penduduk desa. Apabila di negara-negara maju pertumbuhan industri menyertai urbanisasi dan pertumbuhan kota sebagai penarik bagi masyarakat desa untuk bekerja di kota, maka urbanisasi di negara berkembang tidak disertai proses penyerapan tenaga dalam perkembangan industri.

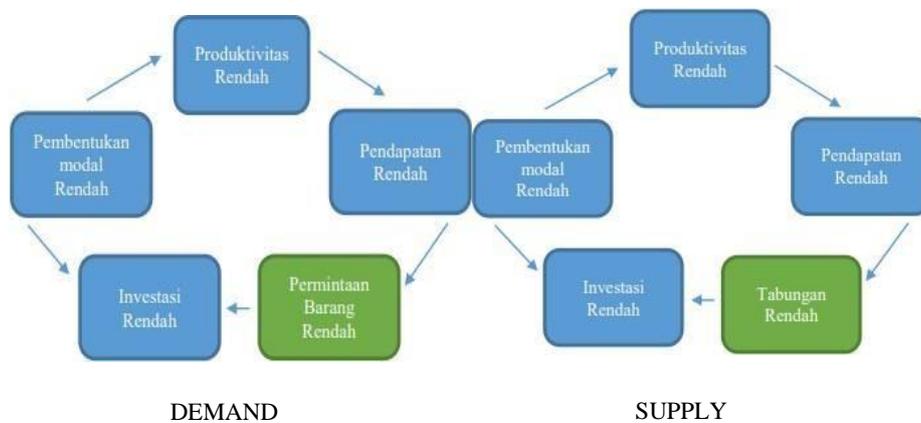
2.1.4 Teori Lingkaran Kemiskinan

Lingkaran kemiskinan adalah suatu lingkaran yang saling memengaruhi satu sama lain secara sedemikian rupa, sehingga menimbulkan suatu keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik. Permasalahan kemiskinan yang

dihadapi oleh negara-negara di dunia memiliki hubungan antara beberapa permasalahan, sehingga mengakibatkan suatu lingkaran kemiskinan (*circle of poverty*). Menurut Kuncoro (2000) penyebab kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, sehingga penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang terbatas dan kualitas yang rendah.
2. Kemiskinan diakibatkan oleh perbedaan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas sumber daya manusia yang rendah mengakibatkan produktivitas yang rendah juga, sehingga akan mendapatkan upah yang rendah.
3. Kemiskinan muncul karena adanya akses modal yang kecil. Dengan modal yang kecil, masyarakat miskin akan sulit untuk mengembangkan suatu usaha untuk memperbaiki perekonomian mereka.

Ketiga penyebab kemiskinan ini berawal pada lingkaran kemiskinan (*circle of poverty*). Pada lingkaran kemiskinan terjadi keterkaitan antara suatu keadaan dengan keadaan lain, Misalnya ketika masyarakat miskin memiliki tabungan yang rendah akan menyebabkan masyarakat miskin hanya memiliki modal yang sedikit dan produksi yang rendah, akibatnya adalah pendapatan yang dimiliki juga akan rendah, keterkaitan antara satu keadaan dengan keadaan lainnya pada lingkaran kemiskinan ini menyebabkan kemiskinan akan terus berlanjut seperti suatu siklus yang harus diputuskan untuk memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat miskin.



Sumber : Nurkse (1953) dalam Kuncoro (2000)

Gambar 2.1 Teori Lingkaran Kemiskinan

Logika berpikir Nurkse dalam Kuncoro (2000) yang menyatakan bahwa Negara miskin itu karena dia miskin (*a poor country is poor because it is poor*). Dalam teorinya tentang lingkaran setan kemiskinan, pada dasarnya Nurkse berpendapat bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan di masa lalu tetapi juga disebabkan oleh hambatan pembangunan di masa yang akan datang. Menurut pendapatnya inti dari lingkaran setan kemiskinan adalah keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap terciptanya pembentukan modal yang tinggi. Di satu pihak pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan dan di lain pihak oleh dorongan untuk menanam modal.

Di Negara berkembang kedua faktor ini sulit untuk dilaksanakan. Jadi, menurut pandangan Nurkse, terdapat dua jenis lingkaran setan kemiskinan yang menghalangi Negara berkembang mencapai pembangunan yang pesat yaitu. Dari segi penawaran modal dan permintaan modal. Menurut Nurkse lingkaran

perangkap kemiskinan dari segi penawaran (*supply*) dimana tingkat pendapatan masyarakat yang rendah yang diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Kemampuan untuk menabung rendah, menyebabkan tingkat pembentukan modal yang rendah, tingkat pembentukan modal (investasi) yang rendah menyebabkan kekurangan modal, dan dengan demikian tingkat produktivitasnya juga rendah dan seterusnya.

Di sisi lain dari segi permintaan (*demand*), di negara-negara yang miskin, dorongan untuk menanamkan modal adalah sangat rendah, Negara- negara miskin perangsang untuk melaksanakan penanaman modal rendah karena luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas, dan hal ini disebabkan oleh pendapatan masyarakat rendah. Pendapatan masyarakat sangat rendah karena tingkat produktivitas yang rendah, sebagai wujud dari tingkatan pembentukan modal yang terbatas di masa lalu. Pembentukan modal yang terbatas disebabkan kekurangan perangsang untuk menanamkan modal dan seterusnya.

2.1.5 Faktor Penyebab Kemiskinan

2.1.5.1 Pertumbuhan Ekonomi

Jhingan (2004) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Definisi ini memiliki tiga komponen : pertama,

pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terusmenerus persediaan barang. Kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk. Ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara tepat. Menurut pandangan ekonom klasik, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan John Straurt Mill, maupun ekonom neo klasik, Robert Solow dan Trevor Swan, mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang digunakan. Menurut Kuncoro (2003) suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya.

2.1.5.2 Penduduk

Penduduk adalah salah satu komponen penting dalam pembangunan suatu wilayah, tetapi tentunya penduduk yang mempunyai daya saing dan yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas perekonomian dari wilayah tersebut. Kuantitas penduduk juga penting karena akan memengaruhi kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Indonesia yang notabene adalah negara berkembang merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk tertinggi di dunia, masalah negara berkembang salah satunya adalah tingkat kelahiran yang tinggi. Laju

pertumbuhan penduduk yang tinggi akan meningkatkan kepadatan penduduk (jumlah orang perkilometer persegi) di suatu wilayah, sehingga semakin padat lahan akan semakin menurunkan kesejahteraan penduduk di sekitar wilayah tersebut.

Tingginya laju pertumbuhan penduduk juga berarti tinggi angka kelahiran bayi, dengan begitu orang dewasa ataupun penduduk yang termasuk angkatan kerja akan menanggung beban bayi ataupun penduduk usia dibawah 15 tahun. Akibatnya angka beban ketergantungan akan meningkat, karena menurut Todaro (2006) penduduk yang berusia lanjut dan anak-anak atau anggota masyarakat yang tidak produktif menjadi beban anggota masyarakat yang termasuk angkatan kerja yang produktif.

Menurut Sukirno (1997) perkembangan jumlah penduduk bisa menjadi faktor pendorong dan penghambat pembangunan.

Faktor pendorong :

- Memungkinkan semakin banyaknya tenaga kerja.
- Perluasan pasar, karena luas pasar barang dan jasa ditentukan oleh dua faktor penting, yaitu pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk.

Faktor Penghambat :

- Menurunkan produktivitas
- Meningkatkan angka pengangguran.

Masalah kependudukan yang dihadapi yaitu tingginya tingkat kelahiran dan tinggi pula angka kematiannya, akan tetapi masih besar angka kelahirannya. Kelahiran yang tinggi salah satunya disebabkan oleh pernikahan di usia dini, dan kurangnya pengetahuan akan program Keluarga Berencana (KB). Sementara itu angka kematian yang tinggi disebabkan oleh masih rendahnya kualitas kesehatan yang dimiliki penduduk negara berkembang

Selain itu untuk melihat gambaran dinamika penduduk suatu wilayah juga dapat dilihat dari laju pertumbuhan penduduknya. Laju pertumbuhan penduduk dilihat dari tiga komponen yaitu : kelahiran, kematian, dan migrasi. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menjadi sumber permasalahan kependudukan. Apabila laju pertumbuhan penduduk tinggi dengan jumlah penduduk yang besar maka beban untuk mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan akan menjadi sangat berat.

2.1.5.3 Pembangunan Manusia

United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu “proses untuk memperluas pilihan- pilihan bagi penduduk” (Human Development Report, 2001), dalam arti bahwa manusia diberi pilihan yang lebih banyak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang menyangkut ekonomi, sosial, dan budaya. Terdapat tiga hal yang dianggap penting dalam pemilihan yang dilakukan oleh manusia, yaitu memiliki kehidupan yang panjang dan sehat, untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan memiliki akses terhadap sumber daya yang diperlukan, untuk mendapat standar hidup yang layak. Apabila

tiga faktor kritis tersebut tidak dipenuhi maka, banyak pilihan lainnya yang tidak akan mampu dicapainya, misalnya kemerdekaan politik, ekonomi, sosial, serta kesempatan untuk memperoleh tingkat produktivitas yang tinggi, menikmati rasa terhormat dan hak-hak asasi manusia.

Konsep pembangunan manusia dalam pengertian di atas jauh lebih luas dari pada teori pembangunan ekonomi yang konvensional, termasuk model pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia (SDM), pendekatan kesejahteraan, dan pendekatan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Model pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan produksi nasional (GNP). Pembangunan SDM menempatkan manusia terutama sebagai input dari proses produksi (sebagai suatu sarana bukan tujuan). Pendekatan kesejahteraan melihat manusia sebagai pemanfaat (beneficiaries) bukan sebagai objek perubahan. Pendekatan kebutuhan-kebutuhan dasar memfokuskan pada penyediaan barang dan jasa kebutuhan hidup.

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang juga merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representative. IPM diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh UNDP.

Menurut BPS (2009), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks

Pembangunan Manusia dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan ke empat komponen, yaitu angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata – rata lamanya bersekolah yang mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata – rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur keberhasilan dalam bidang pembangunan untuk hidup layak.

Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran, konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu. Penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting, diantaranya:

- Membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih.
- Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana.
- Membentuk satu indeks komposit dari pada menggunakan sejumlah indeks dasar.
- Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi.

Dalam indeks pembangunan manusia terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara, yaitu:

- Tingkat kesehatan diukur dengan harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi)
- Tingkat pendidikan diukur dengan jumlah penduduk yang melek huruf atau tingkat pendidikan yang telah dicapai atau lamanya pendidikan seorang penduduk.
- Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.

IPM merupakan rata-rata dari ketiga komponen tersebut, dengan rumus:

$$\text{IPM} = (\text{X1} + \text{X2} + \text{X3}) / 3$$

Dimana :

X1 = Angka harapan hidup X2 = Tingkat pendidikan

X3 = Tingkat kehidupan yang layak

Secara detail, prosedur penghitungan IPM ialah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Prosedur Penghitungan IPM

Komponen IPM	Maksimum	Minimum	Keterangan
Angka Harapan Hidup	85	25	Standar UNDP
Angka Melek Huruf	100	0	Standar UNDP
Rata-rata Lama Sekolah	15	0	Standar UNDP
Daya Beli	732.720	300.000 (1996) 360.000 (1999,2002)	UNDP menggunakan PDB rill disesuaikan

Sumber : UNDP

2.1.5.4 Pengangguran

Dalam menanggapi masalah pengangguran Teori Keynes mengatakan hal yang berlawanan dengan Teori Klasik, menurut Teori Keynes sesungguhnya masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja. menganjurkan adanya campur tangan pemerintah dalam mempertahankan tingkat permintaan agregat agar sektor pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan (Soesastro, dkk, 2005). Perlu dicermati bahwa pemerintah hanya bertugas untuk menjaga

tingkat permintaan agregat, sementara penyedia lapangan kerja adalah sektor wisata. Hal ini memiliki tujuan mempertahankan pendapatan masyarakat agar daya beli masyarakat terjaga. Sehingga tidak memperparah resesi serta diharapkan mampu mengatasi pengangguran akibat resesi.

A. Jenis-jenis Pengangguran

Adapun jenis – jenis pengangguran menurut Sukirno (2016) diantaranya adalah pengangguran terbuka. Pengangguran tersembunyi, pengangguran bermusim dan penduduk setengah menganggur.

- Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja, sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini dalam suatu jangka masa yang cukup Panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan, jadi mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu, yang mana di sebut dengan pengangguran terbuka.
- Pengangguran yang tersembunyi merupakan pengangguran yang tidak secaranyata dapat di lihat dan berlaku pada kegiatan yang jumlah pekerjaan melebihi yang di perlukan maka ini dinyatakan pengangguran tersembunyi.
- Pengangguran bermusim terdapat di sektor pertanian dan perikanan, pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka sehingga mereka terpaksa menganggur, apabila pesawah, nelayan

dan juga penyadap karet tidak melakukan pekerjaan yang lain dan terpaksa menganggur maka ini di sebut pengangguran bermusim.

- Penduduk setengah menganggur merupakan Tenaga kerja yang melakukan kerja atau jam kerja yang jauh lebih rendah dari masa kerja yang lazim di lakukan dalam sehari atau seminggu, yang mana banyak orang dari desa untuk hijrah ke kota yang ingin mengubah hidupnya namun tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah, sehingga terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu, maka pengangguran ini di katakan sebagai penduduk setengah menganggur.

2.1.5.5 Tenaga Kerja Sektor Pertanian dan Non Pertanian

Kemiskinan berkaitan dengan jenis pekerjaan atau lapangan usaha tertentu. Umumnya kemiskinan di Indonesia selalu terkait dengan sektor usaha di bidang pertanian untuk daerah pedesaan dan sektor informal di daerah perkotaan. Hal ini diperkuat dengan hasil studi yang dilakukan oleh Suryahadi et.al (2006) menemukan bahwa selama periode 1984 dan 2002, sektor pertanian memiliki daya serap yang cukup tinggi terhadap tenaga kerja yang ada sehingga sektor pertanian juga sebagai penyedia tenaga kerja bagi sektor industri dan jasa.

Dalam studi tersebut juga ditemukan bahwa sektor pertanian menyumbang lebih dari 50% terhadap total kemiskinan di Indonesia dan ini sangat kontras jika dibandingkan dengan sektor jasa dan industri. Oleh karena tingginya tingkat kemiskinan di sektor pertanian menyebabkan kemiskinan diantara kepala rumah

tangga yang bekerja di sektor pertanian menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang bekerja di sektor lainnya.

Sektor pertanian di Indonesia menyumbang pangsa penyerapan tenaga kerja terbesar dibandingkan sektor lainnya, namun penyerapan tersebut cenderung menurun. Menurunnya pangsa penyerapan tenaga kerja sektor pertanian disebabkan karena bergesernya pembangunan ekonomi dari pertanian ke sektor industri. Pertumbuhan ekonomi suatu negara ditandai dengan terjadinya perubahan struktur ekonomi, adanya peningkatan produktivitas dan partisipasi tenaga kerja. Untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian dapat dipercepat dengan cara memberikan kesempatan kerja bagi sektor pertanian dengan memberikan kesempatan saling menunjang antar sektor.

Perkembangan ekonomi di suatu pedesaan telah ikut andil dalam merubah struktur ketenaga kerjaan di pedesaan, berkembangnya kegiatan non pertanian telah mengakibatkan peralihan tenaga buruh pertanian ke non pertanian yang sudah menjadi barang, tentu akan menimbulkan masalah dalam penyediaan tenaga kerja usahatani (Tambunan 1996). Akibatnya tenaga kerja banyak yang bergeser dari sektor pertanian karena semakin banyaknya lapangan kerja baru.

Meningkatnya pangsa tenaga kerja di sektor pertanian juga harus di waspadai karena apabila kesempatan kerja di sektor pertanian justru lebih kecil dari pada peningkatan pangsa tenaga kerja pertanian maka akan menciptakan pengangguran dan penurunan produktivitas sektor pertanian. Bergesernya struktur ekonomi diharapkan mampu menyerap tenaga kerja ke sektor industri yang memiliki efek

multiplier terhadap sektor lainnya, sehingga lapangan pekerjaan akan tercipta di sektor lain tidak hanya di sektor industri.

Menurut Sawit (1986) faktor yang mendorong dan mengatur permintaan tenaga kerja diakibatkan oleh adanya jadwal tanam yang mengatur pergiliran waktu tanam sehingga secara tidak langsung dapat mempengaruhi permintaan tenaga kerja di daerah tersebut. Menurut Sigit (1986) faktor penyebab terjadinya transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non pertanian dapat dikategorikan menjadi dua yaitu : (1) faktor pendorong dan (2) faktor penarik. Faktor pendorong yang berasal dari sektor pertanian sedangkan faktor penarik berasal dari sektor non pertanian. Secara umum penyebab transformasi tenaga kerja terjadi akibat adanya perubahan pada tingkat pendidikan, penduduk usia muda yang semakin meningkat, perubahan norma-norma yang berhubungan dengan jenis dan situasi pekerjaan dikalangan pencari kerja dan masyarakat umumnya, adanya peluang untuk berkerja di luar sektor pertanian, sempitnya pemilikan lahan pertanian (sawah) dan meningkatnya penggunaan teknologi serta tingkat upah yang relatif lebih tinggi disektor non pertanian.

Ciri pembangunan ekonomi adalah semakin meningkatnya peran sektor non pertanian namun peran sektor pertanian justru menurun, sehingga pembangunan ekonomi secara tidak langsung akan sejalan dengan perkembangan sektor non pertanian atau industri, akibatnya terjadi transformasi tenaga kerja sektor pertanian ke sektor non pertanian.

2.1.6 Hubungan Variabel Bebas dan Terikat

A. Hubungan Pertumbuhan Penduduk dengan Kemiskinan

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu- waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran. Sebutan pertumbuhan penduduk merujuk pada semua spesies, tapi selalu mengarah pada manusia dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai pertumbuhan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia.

Jumlah penduduk yang banyak dianggap sebagai beban pembangunan, dan memperkecil pendapatan perkapita serta menimbulkan masalah ketenagakerjaan. Selain itu penduduk dianggap sebagai pemacu pembangunan. Alasannya merupakan pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai macam kegiatan sehingga menciptakan skala ekonomi dalam produksi yang akan menguntungkan semua pihak, menurunkan biaya produksi dan menciptakan sumber pasokan atau penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai sehingga pada gilirannya akan merangsang output atau produksi agregat yang lebih tinggi lagi, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berarti tingkat kemiskinan akan turun (Todaro dan Smith,2006).

Aliran Malthusian (Thomas Robert Malthus) Malthus adalah orang pertama yang mengemukakan tentang penduduk. Dalam buku “Essay on Population”, Malthus beranggapan bahwa bahan makanan penting untuk kelangsungan hidup, nafsu manusia tak dapat ditahan dan pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan. Teori Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sedangkan ketersediaan pangan mengikuti deret hitung, pada kasus ini dimana terdapat permasalahan meledaknya jumlah penduduk di suatu wilayah yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan, hal ini akan menyebabkan kemiskinan. Jika pertumbuhan penduduk meningkat maka ketersediaan pangan akan sangat terbatas sehingga banyak penduduk yang tidak mendapatkan persediaan pangan yang memadai sehingga kemiskinan akan meningkat. Teori ini jelas menekankan tentang pentingnya keseimbangan pertumbuhan jumlah penduduk terhadap persediaan bahan makanan.

B. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Kemiskinan

Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR).

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, antara lain: (1) umur panjang dan hidup sehat; (2) pengetahuan; (3) standar hidup layak. Adapun manfaat menurut (UNDP), antara lain: (1) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan

dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dalam hal ini masyarakat atau penduduk; (2) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Seiring dalam berjalannya waktu penentuan metodologi penghitungan IPM pun kini sudah dirubah menjadi yang terbaru, alasan yang dijadikan dasar perubahan penentuan metodologi penghitungan IPM antara lain: (1) beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah; (2) penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Todaro dan Smith (2006) mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Yang mana pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta

pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Mulyaningsih (2008) indeks pembangunan manusia memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (Longevity) dan hidup sehat (healthy life), untuk mendapatkan pengetahuan (the knowledge) dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa memenuhi standar hidup. Artinya, tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap kemiskinan.

Menurut Sukmagara (2011) indeks pembangunan manusia mempunyai pengaruh dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Indeks pembangunan manusia memiliki indikator komposit dalam penghitungannya antara lain angka harapan hidup, angka melek huruf dan konsumsi per kapita. Peningkatan pada sektor kesehatan dan pendidikan serta pendapatan per kapita memberikan kontribusi bagi pembangunan manusia, sehingga semakin tinggi kualitas manusia pada suatu daerah akan mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah khususnya di daerah pedesaan.

Untuk memutus lingkaran setan kemiskinan, maka diperlukan investasi manusia yang berkualitas. Hal ini ditujukan agar produktivitas setiap warga bisa meningkat akibat pengetahuan yang dimiliki. Sehingga apabila produktivitas tinggi, diharapkan dapat bersaing di dunia kerja dan dapat turut serta menurunkan kemiskinan.

Hubungan indeks pembangunan manusia juga dapat dijelaskan dengan Model Solow yang merupakan model untuk pertumbuhan ekonomi yang sudah mengalami

perluasan dengan memasukkan sumberdaya manusia sebagai modal (human capital). Pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk miskin aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktifitas dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan sehingga nantinya akan menurunkan kemiskinan.

C. Hubungan Tingkat Pengangguran Penduduk setengah menganggur dengan Kemiskinan

Secara eksplisit untuk membedakan antara golongan penduduk penduduk setengah menganggur (underemployment) dan bekerja penuh (full time) adalah banyaknya waktu yang dipakai untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Sehubungan dengan hal tersebut, Mantra (1982:192) mengatakan bahwa ; penduduk setengah menganggur di ukur dengan jam kerja yaitu yang jam kerjanya kurang dari 35 jam seminggu. Selanjutnya bagi orang yang termasuk memperpanjang waktu kerjanya adalah mereka yang bekerja lebih dari 60 jam dalam seminggu.

Menurut Sukirno (2010:50), salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Pengangguran mengurangi pendapatan masyarakat, hal ini yang dapat mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai.

Lincoln Arsyad (1997), menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Sebagian besar masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya part-time selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin.

Sesuai dengan studi empiris yang dilakukan oleh Fima Anggadini (2015) dimana menganalisis pengaruh variabel Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berhubungan Positif terhadap Kemiskinan.

Menurut teori Keynes sesungguhnya masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah, sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun dan hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja. Sehingga akan mengakibatkan tingkat pengangguran meningkat akibat kurangnya penyerapan tenaga kerja yang akhirnya menurunkan pendapatan masyarakat dan kemiskinan akan meningkat.

D. Hubungan Tenaga Kerja Sektor Pertanian dan Non Pertanian dengan Kemiskinan

Kemiskinan berkaitan dengan jenis pekerjaan atau lapangan usaha tertentu. Umumnya kemiskinan di Indonesia selalu terkait dengan sektor usaha di bidang pertanian untuk daerah pedesaan dan sektor informal di daerah perkotaan. Sektor pertanian di Indonesia menyumbang pangsa penyerapan tenaga kerja terbesar dibandingkan sektor lainnya, namun penyerapan tersebut cenderung menurun. Menurunnya pangsa penyerapan tenaga kerja sektor pertanian disebabkan karena bergesernya pembangunan ekonomi dari pertanian ke sektor industri. Pertumbuhan ekonomi suatu negara ditandai dengan terjadinya perubahan struktur ekonomi, adanya peningkatan produktivitas dan partisipasi tenaga kerja. Untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian dapat dipercepat dengan cara memberikan kesempatan kerja bagi sektor pertanian dengan memberikan kesempatan saling menunjang antar sektor.

Meningkatnya pangsa tenaga kerja di sektor pertanian juga harus di waspadai karena apabila kesempatan kerja di sektor pertanian justru lebih kecil dari pada peningkatan pangsa tenaga kerja pertanian maka akan menciptakan pengangguran dan penurunan produktivitas sektor pertanian. Bergesernya struktur ekonomi diharapkan mampu menyerap tenaga kerja ke sektor industri yang memiliki efek multiplier terhadap sektor lainnya, sehingga lapangan pekerjaan akan tercipta di sektor lain tidak hanya di sektor industri.

Menurut teori permintaan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja yaitu sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan seseorang pengusaha di setiap kemungkinan tingkat upah dalam kurun waktu tertentu. Apabila permintaan tenaga kerja meningkat maka banyak masyarakat yang di pekerjakan oleh perusahaan semakin banyak perusahaan membutuhkan tenaga manusia maka tingkat pengangguran berkurang dan membuat jumlah penduduk miskin juga menurun.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Faradina anggraini, rusdiansyah(2019) <i>“The Effect Analysis of Human Development index, GDRP Per Capita and Population Towards poor population in South Kalimantan 2010 – 2017”</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IPM dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Kalimantan selatan sedangkan variabel PDRB perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Kalimantan selatan	Variabel independen: IPM dan jumlah penduduk. Variabel dependent: jumlah penduduk miskin	Tidak terdapat variabel tenaga kerja penduduk setengah menganggur, lokasi penelitian di Jawa Barat dan tahun penelitian tahun 2011-2019
2	Saparuddin Mukhtar dan Ari Saptono (2019) <i>“The Analysis Of The Effects Of Human</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan negative terhadap kemiskinan sementara itu tingkat pengangguran terbuka tidak	Variabel independent: IPM. Kemiskinan sebagai variabel dependen yang dimana kemiskinan di penelitian terdahulu	Tempat dan tahun penelitian berbeda dan tidak terdapat variabel independent penduduk setengah

	<i>development index and opened unemployment The poverty in Indonesia”</i>	berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia	dalam cangkup luas. Sedangkan dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk miskin	mengganggu
3	Meimela Aidah(2019) Model Pengaruh Tingkat Setengah Pengangguran, Pekerja Informal dan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015-2017	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat setengah pengangguran, memiliki pengaruh sebesar (0,04) terhadap kemiskinan dibandingkan variabel lainnya	Tingkat setengah pengangguran sebagai variabel Independent	Tempat, Tahun, pekerjaan informal dan pengeluaran perkapita yang merupakan variabel independent Kemiskinan sebagai variabel dependen dimana pada penelitian terdahulu dalam arti luas sedangkan dalam penelitian ini Jumlah penduduk miskin
4	Yunie Rahayu(2018) “analisis pengaruh indeks pembangunan manusia, PDRB perkapita dan jumlah pengangguran	Pembangunan manusia indeks (HDI) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap masyarakat miskin di provinsi jambi, PDRBPerkapita berpengaruh negatif dan signifikan. Jumlah penduduk miskin di provinsi jambi, pengangguran dan angka yang	IPM sebagai variabel independent, Jumlah penduduk miskin sebagai variabel dependen.	Jumlah pengangguran merupakan variabel independent, tempat

	terhadap jumlah penduduk miskindi provinsi jambi”	berpengaruh positif dan signifikan terhadap penduduk miskin diIndonesia provinsi jambi.		
5	Cokorda Gede Surya Putra Trisnu dan I Ketut Sudiana (2019) Pengaruh pertumbuhan penduduk, Pengangguran dan Pendidikan terhadap tingkat kemiskinan kab/kota provinsi bali	Hasil peneletian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk, pengangguran, dan pendidikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pertumbuhan penduduk secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Variabel bebas yang dominan mempengaruhi kmiskinan diKabupaten/Kota Provinsi Bali adalah variabel pertumbuhan penduduk.	Pertumbuhan Penduduk sebagai variabel independent Tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen dimana pada penelitian terdahulu dalam arti luas sedangkan penelitian ini jumlah penduduk miskin	Tempat, tahun, Pendidikan sebagai variabel independent dan pengangguran sebagai variabel independent yang dimana pengangguran dalam penelitian terdahulu dalam arti luas sedangkan penelitian ini dalam arti penduduk setengah menganggur
6	Indah Purboningtyas, Indah Retnosari, Tian Guretno, Ari Dirgantara, Dwi Agustina, M al Haris (2020)	Tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun2010-2019, Indeks	Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel independent sedangkan Kemiskinan sebagai variabel dependen namun pada penelitian	Tempat, Tahun penelitian, TPT sebagai variabel independen

	<p><i>“Analysis of the influence of open unemployment levels and humand</i></p>	<p>pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2019, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks pembangunan Manusia (IPM) tidakberpengaruh terhadap tingkat kemiskinan tahun 2010-2019.</p>	<p>terdahulu dimana kemiskinan dalam arti luas sedangkan penelitian ini jumlah penduduk miskin</p>	
--	---	---	--	--

Amelia (2012) melakukan penelitiannya yang berjudul “Analisis FaktorFaktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur”. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan kondisi kemiskinan di NTT dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di NTT. Metode yang digunakan adalah analisis data panel dengan pendekatan Pooled Least Square. Hasil analisis menyebutkan bahwa variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di NTT. Variabel angka harapan hidup memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Selanjutnya, variabel penduduk yang lulus pendidikan SMP memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Penelitian Wijanarko (2013) yang berjudul “Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh curahan jam kerja terhadap penghasilan keluarga miskin, pengaruh pendidikan terhadap penghasilan keluarga miskin, pengaruh usia terhadap penghasilan keluarga miskin di Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan prosedur Simple Random Sampling dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya adalah variabel curahan jam kerja dan pendidikan mempunyai pengaruh positif secara signifikan terhadap kemiskinan sedangkan usia berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Penelitian Kuncoro (2014) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran dan Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2011”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa

Timur tahun 2009- 2011. Penelitian ini menggunakan analisis data panel. Hasil analisis terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur, tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur dan pendidikan yang diproksi dengan angka melek huruf (AMH) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur.

Penelitian Prastyo (2010) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2003-2007)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dari tahun 2003 hingga tahun 2007. Metode analisis yang digunakan dalam penelitiannya adalah panel data dengan pendekatan efek tetap (fixed effect model). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, dan tingkat pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Faisal (2013) yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kesehatan terhadap Produktivitas dan Jumlah Penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Barat.” Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap produktivitas tenaga kerja, tingkat kesehatan terhadap produktivitas tenaga kerja, tingkat pendidikan terhadap kemiskinan, tingkat kesehatan terhadap kemiskinan, produktivitas tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat. Metode analisis yang digunakan dalam penelitiannya adalah yang digunakan adalah regresi berganda dengan metode penghitungan Least Square Dummy Variabel (LSDV). Hasil penelitian menunjukkan

bahwa pendidikan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja, kesehatan berpengaruh positif secara signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja, pendidikan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kemiskinan, kesehatan berpengaruh negatif secara tidak signifikan terhadap kemiskinan, dan produktivitas berpengaruh positif secara signifikan terhadap kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan Safitri (2015) yang berjudul “Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan : Analisis Data Provinsi di Indonesia 2010-2013”. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan kondisi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia, dan menganalisis keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah dengan metode panel data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif secara signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia dan tingkat pengangguran berpengaruh positif secara signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Rangkuti (2009) yang berjudul “Pengaruh Investasi dan Pertumbuhan di Sektor Pertanian Terhadap Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Pertanian”. Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis pengaruh investasi dan tenaga kerja di sektor pertanian terhadap pertumbuhan sektor pertanian. Menganalisis pengaruh investasi dan pertumbuhan di sektor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif menggunakan pendekatan model ekonometrika persamaan simultan (simultaneous-equation) dengan metode Two Stages Least Square (2SLS). Dapat disimpulkan investasi dan pertumbuhan sebelumnya di sektor pertanian berpengaruh

secara positif terhadap pertumbuhan pertanian, sedangkan tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan sektor pertanian. Pengaruh pertumbuhan dan investasi terhadap tenaga kerja di sektor pertanian memiliki hubungan yang positif, sehingga secara implikasi dapat dikatakan untuk menaikkan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian mutlak diperlukan investasi dan pertumbuhan di sektor pertanian.

2.2 Kerangka Pemikiran

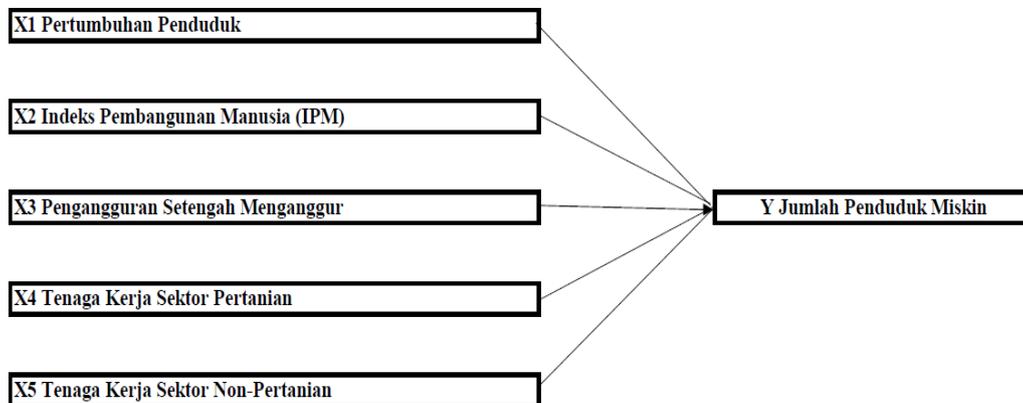
Menurut Teori Nurkse (Mudrajat Kuncoro, 2006), Kemiskinan merupakan permasalahan yang tidak akan ada habisnya dimana Ragner Nurkse mengungkapkan bahwa adanya keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar dan kurangnya modal menjadi penyebab produktivitas rendah sehingga pendapatan yang diterima juga rendah. Rendahnya pendapatan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, dimana jika pendapatan rendah maka akan mengakibatkan penawaran jumlah penduduk juga semakin berkurang, sehingga akan mengakibatkan bertambahnya pengangguran. Menurut Sukirno (1994) pengangguran adalah seseorang yang sedang mencari kerja namun belum mendapatkannya. Karena banyak masyarakat yang ingin bekerja dengan pendapatan yang besar namun hal ini belum dapat di perolehnya.

Kemiskinan merupakan permasalahan besar bagi Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Indonesia telah membuat berbagai kebijakan dalam rangka mengentaskan angka kemiskinan, namun kenyataannya angka kemiskinan masih terus bertambah. Kemiskinan yang terjadi tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini akan



menjelaskan gambaran kondisi kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, dan juga mencari faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan tersebut. Variabel bebas yang akan diteliti pengaruhnya yaitu pertumbuhan penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Penduduk setengah menganggur dan tenaga kerja sektor pertanian & non pertanian.

Gambar 2.2 Desain Penelitian



Gambar 2.3 Kerangka Penelitian

2.3 Hipotesis

Dari permasalahan dan alur kerangka pemikiran, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Penduduk diduga berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diduga berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.
3. Tingkat Pengangguran Penduduk setengah menganggur diduga berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.
4. Tenaga Kerja Sektor Pertanian diduga berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.
5. Tenaga Kerja Sektor Non-Pertanian diduga berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.